



PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DAN SEKTOR SWASTA







Dalam Rangka Mewujudkan Pengadaan Barang
dan Jasa Bersih dan Berintegritas

Kolaborasi Direktorat IV Korsup dan Direktorat
Antikorupsi Badan Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi

Manado, 2 November 2023

01. TUGAS dan FUNGSI KPK

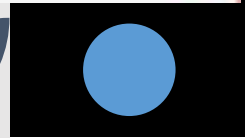
Pasal 6 UU No 19 Tahun 2019

-  **Pencegahan (Ps. 7)**
Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
-  **Supervisi (Ps. 10)**
Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
-  **Koordinasi (Ps. 8)**
Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
-  **Penindakan (Ps. 11-12ABCD)**
Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
-  **Eksekusi (Ps. 13)**
Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
-  **Monitor (Ps. 9)**
Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah .

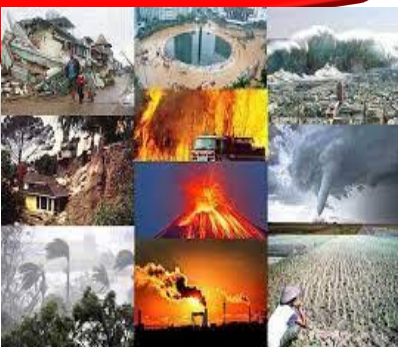




4 MASALAH BANGSA



BENCANA ALAM



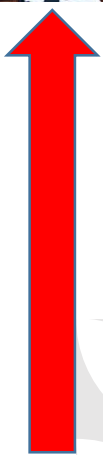
**TERORISME/
RADIKALISME**



**PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**



KORUPSI



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK



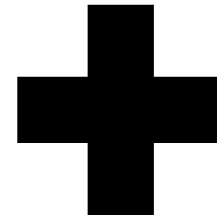
“DON’T WANT TO CORRUPT”
BY EDUCATION
(MEMBANGUN NILAI)



“CAN’T CORRUPT”
BY PREVENTION
(PERBAIKAN SISTEM)



“DARE NOT CORRUPT”
BY ENFORCEMENT
(EFEK JERA)



PUBLIC PARTICIPATION
(PARTISIPASI MASYARAKAT)

UU No 31/1999 Jo No. 20/2001 Pasal
41 Tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

MENGAPA
KORUPSI
HARUS DIBERANTAS?



KARENA **KORUPSI** ITU...



BUSUK



SERAKAH



SUAP

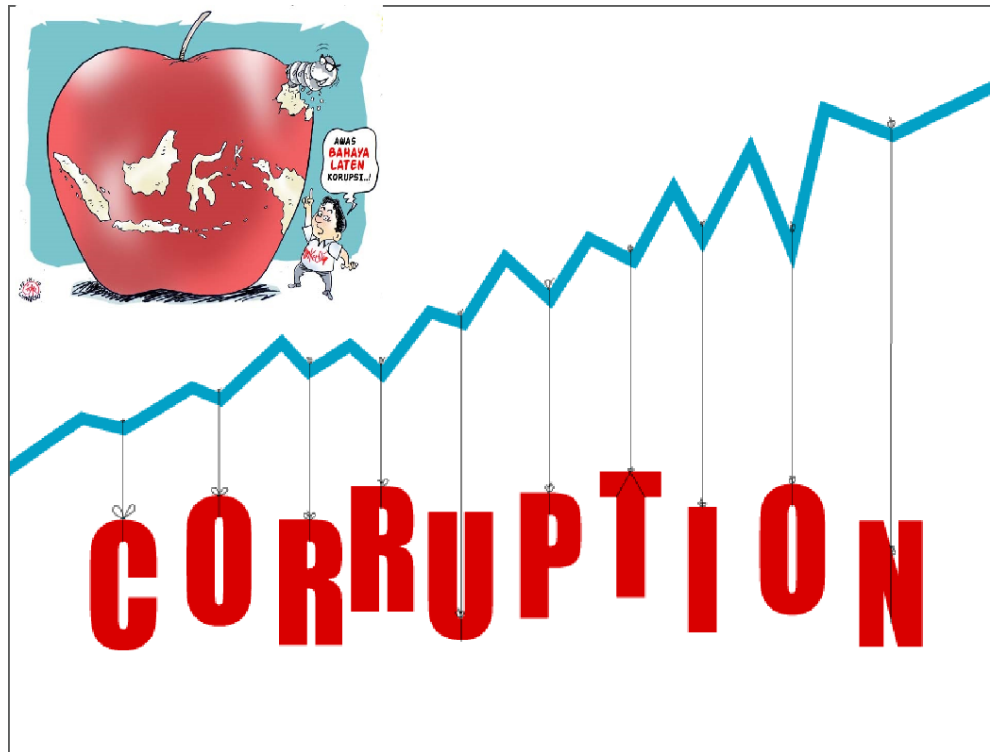
Korupsi berasal dari bahasa Latin—salah satu bahasa kuno di Italia.

- corruptio* (kata benda) : hal merusak
- corrumpere* (kata kerja) : merusak/menghancurkan
- corruptor* (kata benda) : perusak/pelanggar; pelaku korupsi
- corruptus-a-um* (kata sifat): rusak/hancur

dikutip dari buku *Korupsi Melacak Arti, Menvimak Implikasi* karya B. Herry

Mengapa kekayaan yang dimiliki negara Indonesia belum membuat rakyat Indonesia makmur?





Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 29,5 T
 Oleh: Ian | Dilihat 242 kali | 09 Dec 2011, 15:29:21 | Ekonomi & Bisnis

Jakarta, FaktaPos.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam lima tahun terakhir menemukan sejumlah laporan keuangan milik instansi pemerintah yang terindikasi tindakan korupsi.

"Itu berdasarkan pemeriksaan lima tahun terakhir, ada 318 temuan yang mengandung unsur korupsi dengan kerugian negara mencapai 450 juta dollar," ungkap Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta (09/12).

Utang Ditambah karena Korupsi Masih Marak
 Keuangan Negara

Khaerudin | Agus Mulyadi | Selasa, 6 Desember 2011 | 23:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Korupsi menjadi salah satu penyebab tingginya utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit, saat pengeluaran negara membengkak akibat korupsi. Sementara itu, di sisi penerimaan, targetnya tak tercapai.

KORUPSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA



KORUPSI MERUSAK MORAL&SENDI NEGARA



KORUPSI MENGHAMBAT PEMBANGUNAN

KORUPSI ? (UU20/2001)

Pasal 2 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau **korporasi**) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.

**Berdasarkan
Hukum Yang
Berlaku**

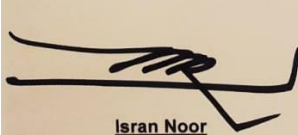
Pasal 3 UU no. 31 th. 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu **korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

KOMITMEN ANTIKORUPSI
KEPALA DAERAH

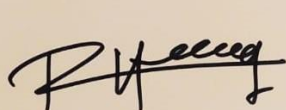
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN, AKUNTABEL
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME,
KAMI KEPALA DAERAH SELURUH INDONESIA BERKOMITMEN:

1. Mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi; dan
4. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan.

Jakarta, 21 Maret 2023



Isran Noor
Ketua APPSI

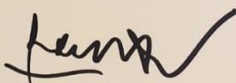


Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Ketua APKASI



Bima Arya Sugiarto
Ketua APEKSI

Menyaksikan,



Firlil Bahuri
Ketua KPK

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
DAN
PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2023



RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH
DAN
PELUNCURAN INDIKATOR MCP TAHUN 2023





7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi

7 HINDARI! BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI!

BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001, KORUPSI DIRUMUSKAN KE DALAM 30 BENTUK. NAMUN SECARA UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT DAPAT DIKELOMPOKAN DALAM 7 BENTUK.



1. MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.



2. GRATIFIKASI

Pejabat Penyelenggara Negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.



3. PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pejabat Penyelenggara Negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu-membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.



4. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pejabat Penyelenggara Negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan.



5. PERBUATAN CURANG

Tindakan curang oleh Pemborong Ahli Bangunan, Pengawas Proyek, Rekanan TNI/Polri yang merugikan



6. PEMERASAN

Pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu



7. SUAP-MENYUAP

Upaya suap-menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya



PAHAMI BEDANYA

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak ada kesepakatan



Contoh:

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
- Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup



Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa



Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

APA ITU GRATIFIKASI ?



Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:



Uang



Barang



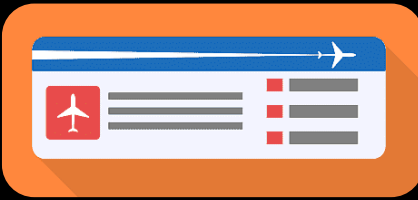
Rabat



Komisi



Pinjaman tanpa bunga



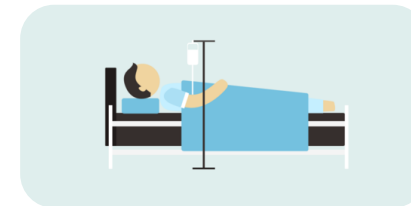
Tiket perjalanan



Fasilitas Penginapan



Perjalanan Wisata



Pengobatan cuma-cuma



Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di **dalam negeri** maupun di **luar negeri** dengan menggunakan **sarana elektronik** atau **tanpa sarana elektronik**

MENGAPA HARUS IKUT BERPARTISIPASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI?

Kita adalah korban
utama korupsi

Partisipasi sudah
dijamin oleh hukum
(ps. 41/31 Th 1999)

Sistem yang
korup

Fungsi Kontrol
sosial

Meningkatnya
budaya
konsumerisme

Mendorong Tata
Kelola Pemerintah
yang Akuntabel

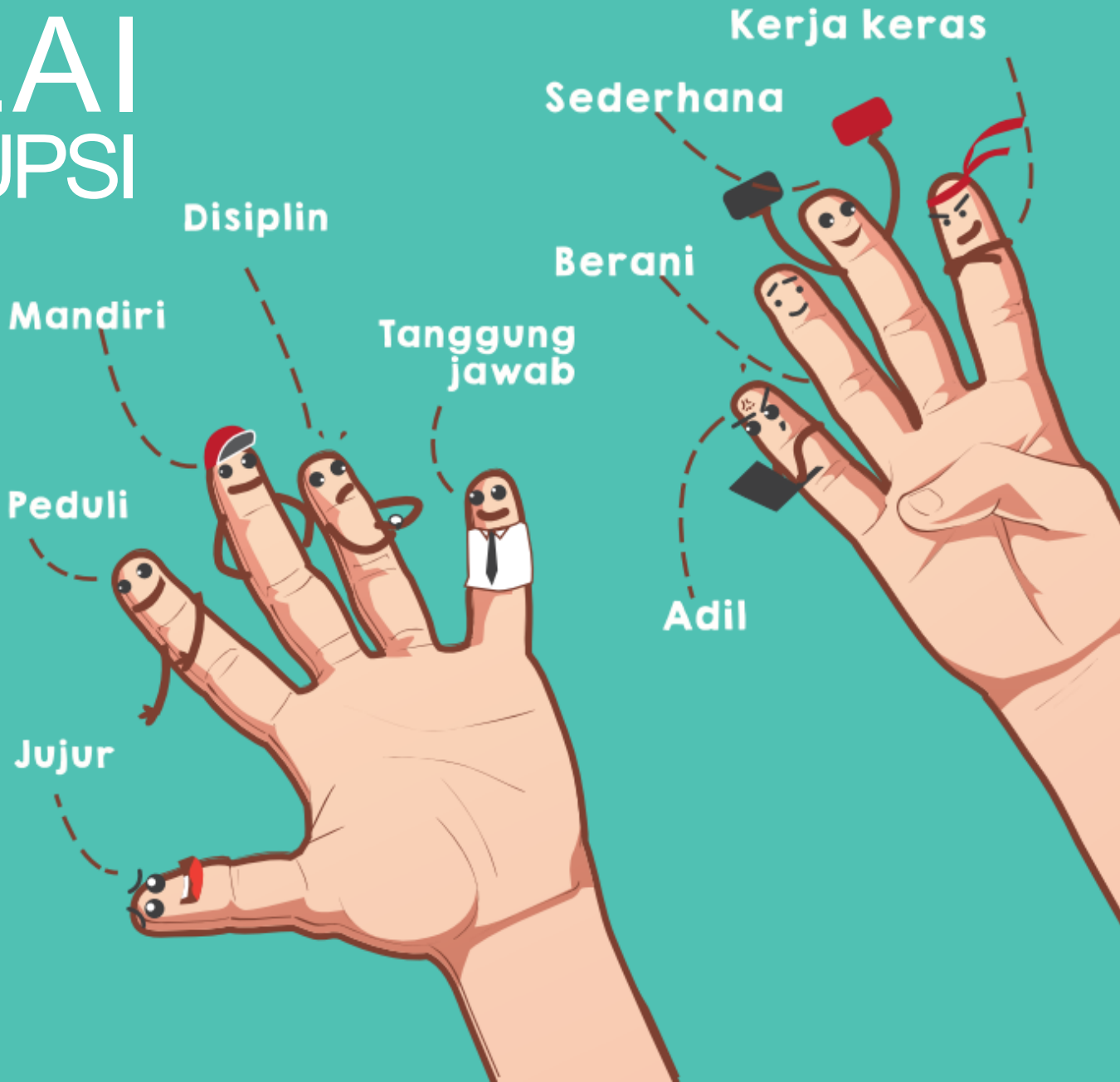
Budaya permisif,
pragmatis, hedon,
dan rapuhnya nilai
agama + keluarga

Meningkatkan
mutu demokrasi



9 NILAI ANTIKORUPSI

JuMaT BerSePeDA KK



PROGRAM PENCEGAHAN KOORDINASI DAN SUPERVISI



01

Tata Kelola Pemerintahan

8 Area Intervensi : (1). Perencanaan & Penganggaran APBD; (2). PBJ; (3). Perizinan; (4). APIP; (5). Manajemen ASN; (6). Manajemen BMD; (7). Optimalisasi Pajak Daerah; (8). Tata Kelola Dana Desa.



02

Sertifikasi Aset

Sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset



03

Penertiban Aset

Penertiban aset bermasalah (dikuasai pihak ketiga, daerah pemekaran, P3D, tumpang tindih, Prasarana Sarana Utilitas)



04

Inovasi Optimalisasi Pajak Daerah

Inovasi dalam rangka meningkatkan pajak daerah



05

Peningkatan Kompetensi APIP

Pelatihan APIP (bekerjasama dengan BPKP), fokus pada: (1). Audit Investigasi; (2). Probity Audit; (3). Pengadaan Barang dan Jasa



06

Optimalisasi BUMD

Optimalisasi Peran BUMD bagi Pemda, Pengelolaan BUMD yang sehat, Implementasi Pencegahan Korupsi



FOKUS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Indikator

Perencanaan dan Penganggaran



Manajemen ASN



Pengadaan Barang dan Jasa



Manajemen Aset



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan)



Optimalisasi Pendapatan



APIP



Dana Desa



Sub Indikator



FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023

- Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran
- Kesesuaian Pokir, Program dan Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
- Pakta Integritas**
- Pengawasan Bantuan Pemerintah**
- Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana Transfer, Dana Desa**
- Tidak ada hutang APBD**



Perencanaan dan Penganggaran

- Tender Pra-DIPA**
- Pengadaan Langsung**
- Konsolidasi Pengadaan
- TKDN & e-Purchasing**
- Reviu HPS dan *Probitiy Audit* PBJ Strategis
- Survey Kepuasan Masyarakat**
- Vendor Management System



Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketersediaan RTRW/ RDTR**
- Penggunaan sistem online
- Media Publikasi
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Optimalisasi PTSP**
- TL Kendala Perizinan**
- Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan

- Kapasitas dan Anggaran APIP
- Penguatan Kelembagaan APIP
- Objektivitas dan independensi APIP
- PUTT dan PWKKND**
- Penanganan Pengaduan
- Reviu Tata Kelola
- Sosialisasi Antikorupsi**

Pengawasan APIP

- Sistem Merit**
- Evaluasi Jabatan
- Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi
- Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan ASN
- Manajemen Kinerja dan TPP
- Penegakan Kode Etik
- Kepatuhan LHKPN



Manajemen ASN

- Database Pajak
- Inovasi Pajak
- Capaian Peningkatan dan Penagihan Tunggakan Pajak**
- Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak



Optimalisasi Pajak

- Database BMD
- Rekonsiliasi dan Inventarisasi
- Penguasaan Fisik BMD
- Sertifikasi BMD**
- Penertiban BMD**
- Pakta Integritas** dan Sosialisasi Pemanfaatan BMD

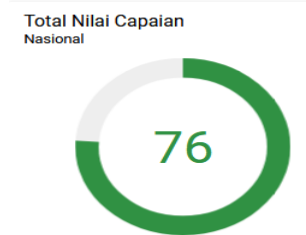


Manajemen BMD

- Pengelolaan APBDes melalui SISKEUDES
- Konsolidasi APBDes
- Publikasi dan Transparansi
- Database Aset Desa
- Audit Keuangan dan Pembinaan Desa

Tata Kelola Desa

CAPAIAN MCP PEMDA SULAWESI UTARA TAHUN 2021 DAN 2022



Instansi	Tahun 2021	Tahun 2022	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Pengadaan Barang dan Jasa	Perizinan	Pengawasan APIP	Manajemen ASN	Optimalisasi Pajak Daerah	Pengelolaan BMD	Tata Kelola Keuangan Desa
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	96,71	95,04	100	93,72	92,61	91,9	91,92	96,77	97,35	100
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	83,23	94,04	100	97,06	94,46	92,79	85,48	92,86	93,35	89,47
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	92,67	93,92	90,32	94,16	100	94,83	91,3	87,68	98,2	0
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	90,68	86,55	79,68	85,68	92,61	95,65	72,94	84,59	89	86,08
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	62,9	85,24	96,84	89,55	77,48	86,2	73,35	79,78	91,39	74,4
Pemerintah Kota Kotamobagu	65,95	85,1	72,11	91,64	90,76	85,24	87,46	78,28	87,32	0
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	74,48	82,77	68,34	81,52	100	84,61	70,21	81,69	91,31	83,83
Pemerintah Kota Tomohon	70,16	82,58	88,82	81,43	94,46	93,07	59	61,68	89,27	0
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	58,68	81,51	80,86	97,48	81,69	67,65	71,98	85,34	76,14	83,08
Pemerintah Kabupaten Minahasa	75,28	81,1	87,03	82,64	96,64	70,91	69,53	79,42	76,97	88,68
Pemerintah Kota Bitung	67,63	81,02	74,51	78,1	85,89	80,01	91,3	75,95	86,43	0
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	51,7	76,72	74,76	81,72	75,67	90,65	68,56	62,07	73,12	71,8
Pemerintah Kota Manado	57,48	74,85	55,76	75,75	93,53	77,81	71,85	68	80,22	0
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	49,69	69,71	92,25	50,85	77,59	80,53	58,16	54,58	71,7	81,9
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	62,44	67,03	76,37	64,14	92,19	70,98	69,94	51,56	28,34	90,35
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	67,51	64,91	67,19	66,17	80,68	53,88	61,29	55,68	69,85	68,6

INDEKS SPI PEMDA SULAWESI UTARA TAHUN 2021 DAN 2022

SULAWESI UTARA

Nama Instansi	2021	2022
Provinsi Sulawesi Utara	62,67	77,77
Kabupaten Bolaang Mongondow	76,22	72,44
Kabupaten Minahasa	73,96	72,25
Kabupaten Kepulauan Sangihe	69,48	71,3
Kabupaten Kepulauan Talaud	56,16	67,56
Kabupaten Minahasa Selatan	79,23	76,7
Kabupaten Minahasa Utara	74,46	71,34
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	70,34	70,31
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	78,59	74,69
Kabupaten Minahasa Tenggara	77,01	76,62
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	84,62	74,11
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	78,72	71,09
Kota Manado	72,32	63,64
Kota Bitung	66,95	72,3
Kota Tomohon	78,82	74,33
Kota Kotamobagu	79,34	76,48

SPI bertujuan untuk membantu instansi memetakan resiko Korupsi dan mengukur efektifitas upaya pencegahan Korupsi yang telah dilakukan.

Dimensi Pengukuran:

1. Transparansi
2. Pengelolaan SDM
3. Pengelolaan Anggaran
4. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas
5. Trading Influences
6. Pengelolaan PBJ
7. Sosialisasi Antikorupsi

Apakah masih ada praktik2 Suap/Pemerasan/Gratifikasi, Penyalahgunaan Fasilitas Kantor, Jual Beli Jabatan, Intervensi, Korupsi PBJ?

Pemetaan Risiko Korupsi [Sulawesi Utara]

INTERNAL

Perdagangan Pengaruh

Pemda	Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Kebijakan SDM	Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Negosiasi Sanksi/Denda	Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Pemberian Izin/Rekomendasi	Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Pemenang Tender	Percaya Terdapat Pihak Lain dalam Penentuan Program	Percaya terhadap Pihak lain dalam Penetapan penerima dan penyaluran bantuan- bantuan
Kabupaten Bolaang Mongondow	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Kabupaten Kepulauan Sangihe	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Talaud	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
Kabupaten Minahasa	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Minahasa Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Minahasa Tenggara	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa Utara	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Kota Bitung	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Kotamobagu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Manado	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Tomohon	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Provinsi Sulawesi Utara	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

6

5

5

Pemetaan Risiko Korupsi [Sulawesi Utara]

INTERNAL

Survei Penilaian Integritas

Pengelolaan SDM

Pemda	Peluang mendapat respon negatif (dikucilkan, sanksi, mutasi, karir dihambat dll)	Pengaruh kekerabatan pada promosi dan mutasi	Pengaruh kedekatan pejabat pada promosi dan mutasi	Pengaruh golongan/organisasi/almamater pada promosi dan mutasi	Sering melihat/mendengar promosi/mutasi karena nepotisme	Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)
Kabupaten Bolaang Mongondow	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Kepulauan Sangihe	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Talaud	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Minahasa	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi
Kabupaten Minahasa Selatan	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Minahasa Tenggara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa Utara	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Bitung	Rendah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Kota Kotamobagu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Manado	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Tomohon	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah
Provinsi Sulawesi Utara	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

Pemetaan Internalisasi [Sulawesi Utara]

Sosialisasi AntiKorupsi

INTERNAL

Survei Penilaian Integritas

Pemda	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi	Keteladanan oleh Pimpinan Tertinggi Unit Kerja untuk mendorong pencegahan korupsi	Keyakinan bahwa pegawai yang diduga melakukan korupsi akan diproses sesuai ketentuan	Menghindari konflik kepentingan	Pelaporan Gratifikasi	Pelaporan LHKPN/LHKASN	Pelaporan Suap	Pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui
Kabupaten Bolaang Mongondow	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kurang	Kurang	Tinggi	Kurang	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tinggi	Sedang	Tinggi	Kurang	Kurang	Tinggi	Kurang	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kurang	Kurang	Sedang	Rendah	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Tinggi	Sedang	Sedang	Kurang	Kurang	Sedang	Kurang	Rendah
Kabupaten Kepulauan Talaud	Kurang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa	Sedang	Tinggi	Kurang	Rendah	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa Selatan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Kurang	Rendah	Kurang	Kurang	Rendah
Kabupaten Minahasa Tenggara	Sedang	Sedang	Tinggi	Kurang	Kurang	Tinggi	Kurang	Rendah
Kabupaten Minahasa Utara	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kurang	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
Kota Bitung	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Kurang	Rendah	Rendah
Kota Kotamobagu	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kurang	Kurang	Tinggi	Sedang	Rendah
Kota Manado	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang	Kurang
Kota Tomohon	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Kurang	Sedang	Kurang	Rendah
Provinsi Sulawesi Utara	Kurang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah

15

15

14

16

Pemetaan Internalisasi [Sulawesi Utara]

EKSTERNAL

Survei
Penilaian
Integr

Transparansi dan Keadilan Layanan

Pemda	Adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu	Aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan	Kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan	Kemudahan untuk mengikuti S
Kabupaten Bolaang Mongondow	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Kepulauan Talaud	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Minahasa	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa Selatan	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Kabupaten Minahasa Tenggara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Minahasa Utara	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Bitung	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Kotamobagu	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kota Manado	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kota Tomohon	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Provinsi Sulawesi Utara	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

PERMASALAHAN PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA



Kasus Korupsi

- 51% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah kasus korupsi terkait pengadaan barang/ jasa dan keuangan negara
- Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 sebesar **Rp814,6 Triliun** untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah
- Anggaran infrastruktur melalui TKD sebesar **Rp92,98M**
- TKD Pendidikan **Rp305,6 T**; TKD Kesehatan **Rp60T**; TKD bantuan sosial dan subsidi **Rp17T**; TKD ketahanan pangan **Rp22,5T**;

Hasil SPI 2022

- Pemenang vendor sudah diatur
- Kualitas barang dan jasa rendah
- Nepotisme, Gratifikasi
- Hasil PBJ tidak bermanfaat

Modus Korupsi

- Penyuaan dengan perjanjian pelaksanaan proyek PBJ
- Intervensi PBJ untuk pengaturan pemenang tender atau penunjukan langsung, mark up dengan memberikan uang suap
- Spesifikasi mengarah ke rekanan tertentu
- Pejabat Negara meminta uang jasa dibayar di muka kpd penyedia sebelum melaksanakan proyek
- Penyuaan untuk mendapatkan alokasi DAU/ DAK

KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA



Korupsi Pengadaan Infrastruktur Kab. Muara Enim

- ❑ 2019: OTT Bupati karena menerima USD 35 ribu terkait 16 proyek pengerjaan jalan dari dana aspirasi anggota DPRD senilai Rp129 M
- ❑ 2021: Wakil Bupati dan 25 dari total 45 anggota DPRD di Muara Enim turut menerima aliran dana fee proyek



Korupsi Pengadaan Lahan

- ❑ PMD Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya utk pengadaan lahan
- ❑ Pengadaan Lahan untuk RTH Kota Bandung
- ❑ Pengadaan lahan utk pembangunan polder air Kota Bekasi



Korupsi Pengadaan Proyek Infrastruktur Kab. Pakpak Bharat

- ❑ Bupati menerima uang Rp1,6M terkait proyek infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR
- ❑ Kualitas jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi

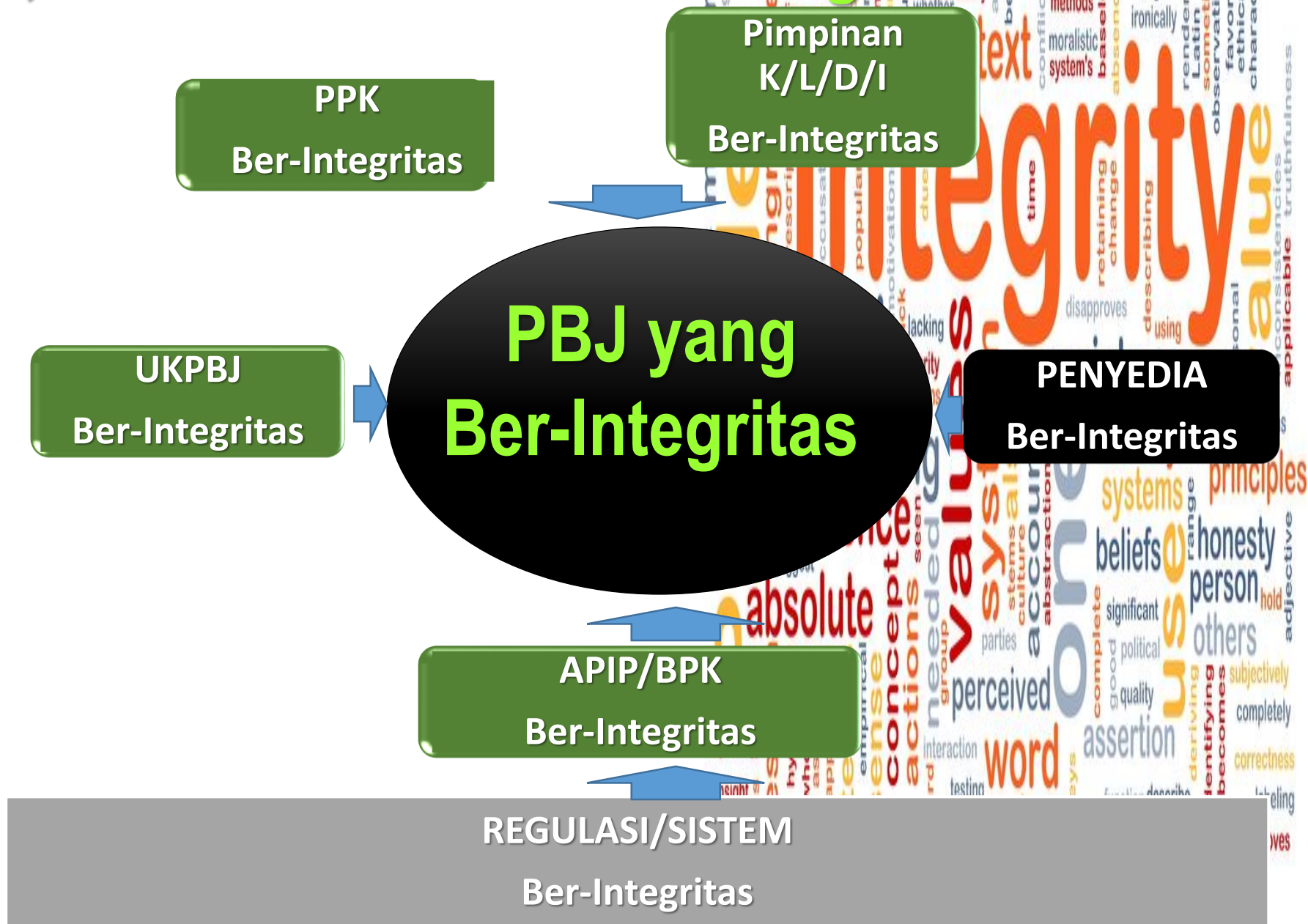
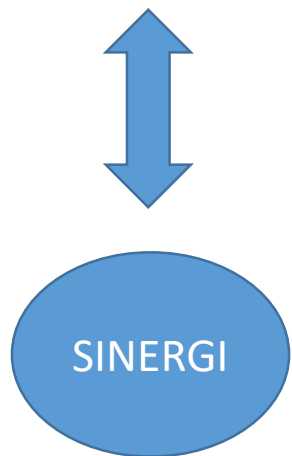


Korupsi Proyek PBJ Sulawesi Selatan

- ❑ Penerimaan suap/ gratifikasi Gubernur Sulsel dari para kontraktor dg modus uang operasional hingga sumbangan masjid serta bantuan sosial COVID-19
- ❑ Uang suap/ gratifikasi terkait proyek PBJ, al: proyek ruas jalan Palampang Munte Bontolempangandan Jalan Palampang Munte Bontolempangan I, proyek bibit talas Jepang

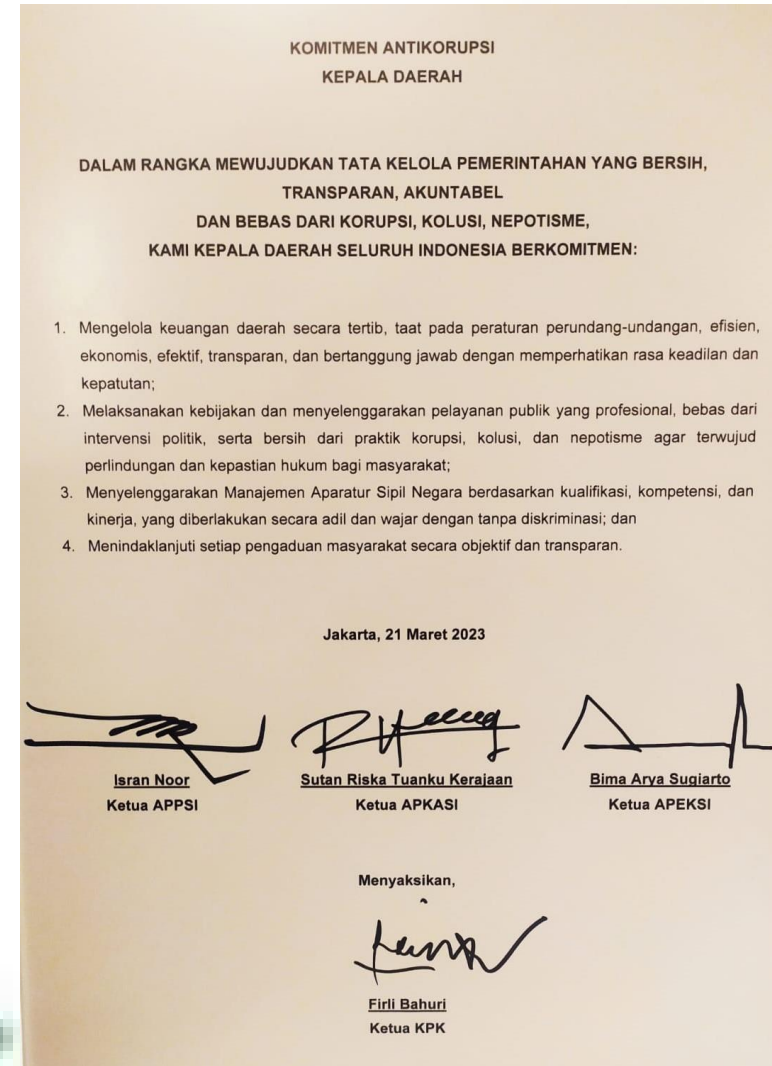


PBJ Bersih, Profesional dan Ber-Integritas



Pimpinan K/L/D/I ber-Integritas, antara lain

- **Komitmen** untuk berantas Korupsi dan anti korupsi
- Menjalankan tugas benar benar sesuai tupoksi (bebas dr kepentingan apapun)
- Tidak ada Benturan Kepentingan
- Memberi tauladan yang baik dan anti korupsi serta mengembangkan budaya anti korupsi di diri maupun jajarannya
- Tidak melakukan KKN maupun intervensi
- Pengawasan dan Penegakan sanksi
- Penerapan Nilai Nilai Anti Korupsi



PPK, UKPBJ Profesional, Bersih dan BerIntegritas

- **Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi**
- Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk Pengelola Pengadaan (UKPBJ, PPK);
- Peningkatan Profesionalitas Pengelola PBJ (Tupoksi);
- Penerapan Prinsip dan Nyata Etika Pengadaan;
- Tidak ada benturan Kepentingan
- Pembentukkan Sistem Integritas khusus di PBJ termasuk Fraud Control dan Wistleblower System;
- Perlu dibangun Sistem Perlindungan Terhadap Penyelenggara Pengadaan Dari Intervensi Atasan/Pimpinan K/L/D/I
- Penyedia yang Ber- Integritas dengan mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis.
- Pengawasan dan penegakan sanksi

APIP BerIntegritas, antara lain

- **Komitmen untuk berantas Korupsi dan anti korupsi**
- Pola Rekrutmen berbasis Kompetensi dan Nilai Integritas untuk APIP
- Menjalankan tugas secara Profesional sesuai Tupoksinya
- Menyajikan hasil audit sesuai kondisi yang ada
- Melakukan pengawasan secara baik
- Melakukan penyelesaian temuan internal eksternal secara tuntas



Penyedia Profesional, Bersih dan BerIntegritas

- Mengedepankan Profesional dan Etika Bisnis
- Menjalankan Prinsip dan Etika Pengadaan
- Meningkatkan kompetensi diri dan daya saing
- Stop KKN
- Stop Pinjam Bendera
- Bangga pada Kompetensi diri bukan “**bangga karena pintar berkolusi dan bernegosiasi**”
- Sadar sanksi pada korporasi

BEBERAPA CONTOH DAMPAK



Jembatan ATJ Rp341 milyar



Dermaga Rp57 milyar



Jalan Mencelew Rp183 milyar



RSUD di
Kab Bolaemo



Rumdin Bupati Minahasa Utara



Rumdin Bupati Bolmut



Turap di Kab Boalemo

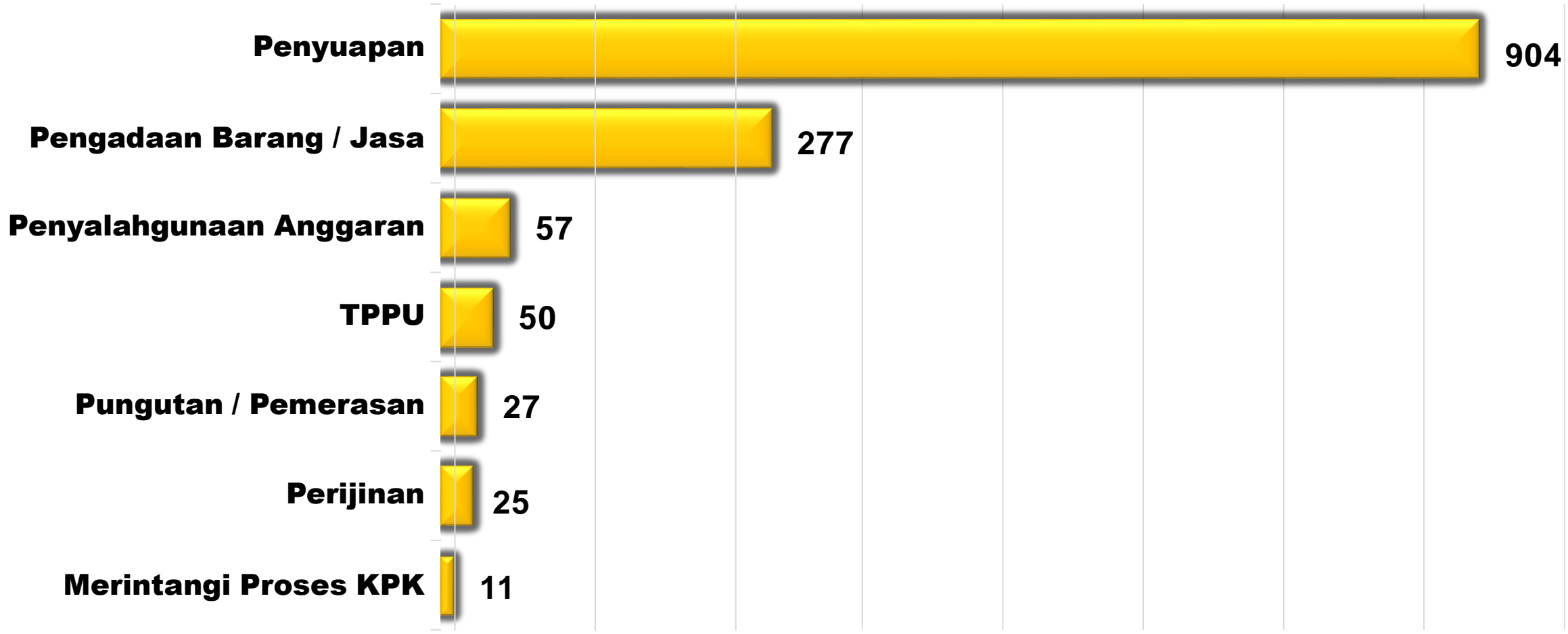
Potensi : Rumah Sakit ambruk, jalan rusak
dll ===korban?

Anggaran Besar Tanpa Manfaat VS Kemiskinan yang masih banyak di sekitar kita



Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

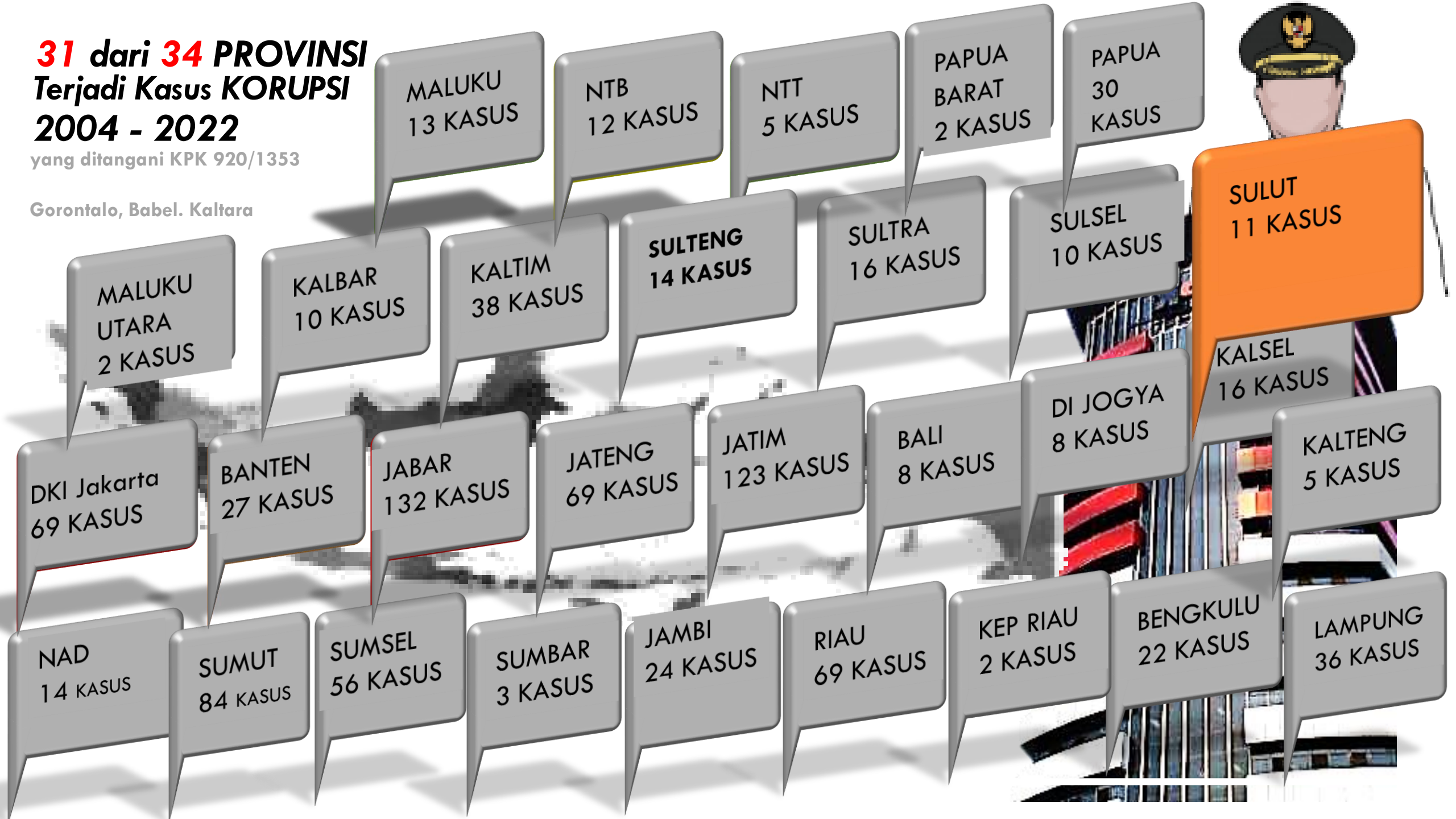
Berdasarkan Modus Operandi Tahun 2004 – 31 Desember 2022 yang ditangani KPK



31 dari 34 PROVINSI Terjadi Kasus KORUPSI 2004 - 2022

yang ditangani KPK 920/1353

Gorontalo, Babel. Kaltara



Jabatan Tersangka Korupsi dari 1519 orang

2004 - 2022

Sumber: Data Penindakan KPK, 31 Desember 2022

DPR/DPRD
343

Es.I/II/III
310

Walikota/
Bupati &
Wakilnya
155

Hakim
29

Pengacara
16

Jaksa
11

Korporasi
8

Swasta
373

Lainnya
200

Menteri/
Kepala K/L
35

Gubernur
23

Komisioner
8

Dubes
4

Polisi
4





**Indonesia Sejahtera
bebas dari korupsi**

Insyallah, BISA !

Bagaimana Peran Kita ?

Ikut-ikutan Korupsi



Diam Saja dengan Kondisi Ini...

Menjadi Pejuang....



“Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian”
- Baharuddin Lopa





**SEMOGA ALLAH SWT MEMBERI KITA KEKUATAN
MENYIAPKAN BANGSA YANG BERMARTABAT**





Gedung Merah Putih KPK,



Telp. (021) 2557 8389



0855 8575 575 / 0811 959 575



PO BOX 575 Jakarta 10120



pengaduan@kpk.go.id



<http://kws.kpk.go.id>



Fax: (021) 2557 8415

TERIMA KASIH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta Selatan 12920

Telp. 021-2557 8300,

Fax : 021-2557 8333